

LAPORAN GLOBAL AMNESTY INTERNATIONAL

**HUKUMAN DAN**

**EKSEKUSI MATI**

**2020**

**AMNESTY  
INTERNATIONAL**

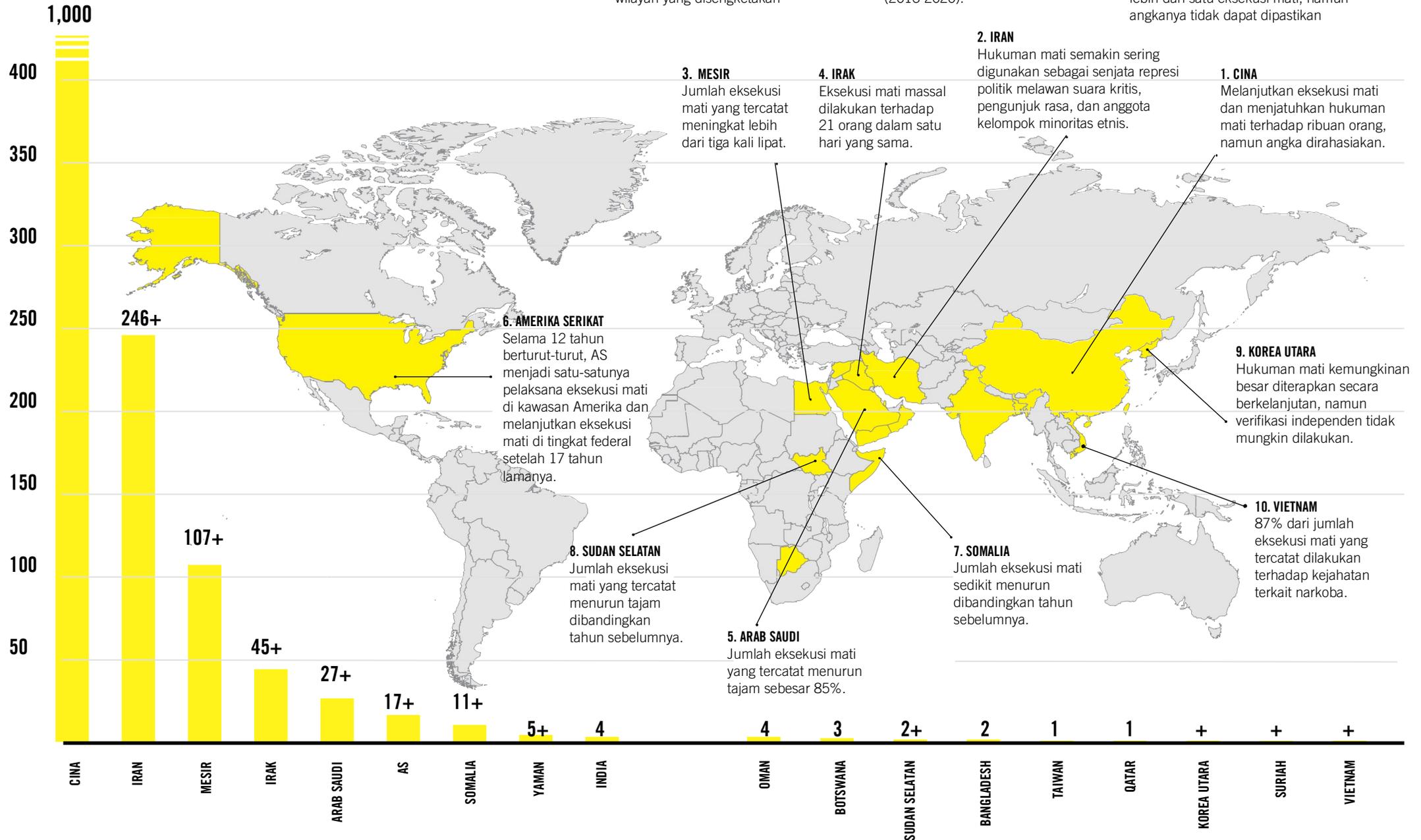


# NEGARA PELAKSANA EKSEKUSI MATI DI 2020

Peta ini menggambarkan lokasi umum terkait batas dan yurisdiksi wilayah dan tidak dapat diinterpretasikan sebagai pandangan Amnesty International atas wilayah yang disengketakan

Sepuluh (10) negara yang diberi nomor pada peta ini terus melaksanakan eksekusi mati dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020).

+ mengindikasikan jumlah minimum yang dihitung oleh Amnesty International. Di mana + tidak didahului oleh angka, artinya Amnesty International percaya bahwa terdapat lebih dari satu eksekusi mati, namun angkanya tidak dapat dipastikan



# DAFTAR ISI

<b>LAPORAN ANGKA PENERAPAN HUKUMAN MATI AMNESTY INTERNATIONAL</b>	<b>4</b>
<b>PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2020</b>	<b>5</b>
TREN GLOBAL	5
JUMLAH NEGARA ABOLISIONIS (1945-2020)	7
EKSEKUSI	7
EKSEKUSI GLOBAL YANG TERCATAT (2011-2020)	8
METODE EKSEKUSI PADA TAHUN 2020	9
NEGARA PENGEKSEKUSI YANG DIKETAHUI OLEH ORGANISASI PEMERINTAH INTERNASIONAL PADA TAHUN 2020	9
HUKUMAN MATI	10
HUKUMAN MATI GLOBAL YANG TERCATAT	10
<b>ASIA-PACIFIC</b>	<b>12</b>
TREN REGIONAL	12
PERKEMBANGAN NEGARA YANG PATUT DIPERHATIKAN	13
VONIS HUKUMAN MATI BARU YANG TERCATAT DI INDIA (2015-2020)	13
VONIS HUKUMAN MATI BARU YANG TERCATAT DI	16
INDONESIA TAHUN 2016-2020	16
<b>ANNEX I: EKSEKUSI DAN HUKUMAN MATI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2020</b>	<b>23</b>
EKSEKUSI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2020	23
HUKUMAN MATI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2020	24
<b>ANNEX II: NEGARA ABOLISIONIS DAN RETENSIONIS SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020</b>	<b>24</b>
<b>1. ABOLISIONIS UNTUK SEGALA JENIS KEJAHATAN</b>	<b>25</b>
<b>2. ABOLISIONIS UNTUK KEJAHATAN BIASA</b>	<b>26</b>
<b>3. ABOLISIONIS DALAM PRAKTIKNYA</b>	<b>26</b>
<b>4. RETENSIONIS</b>	<b>26</b>

# LAPORAN ANGKA PENERAPAN HUKUMAN MATI AMNESTY INTERNATIONAL

Laporan ini mencakup penerapan hukuman mati secara yudisial untuk periode Januari hingga Desember 2020. Seperti tahun-tahun sebelumnya, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain: angka resmi; putusan; informasi dari orang-orang yang dijatuhi hukuman mati dan keluarga serta perwakilan mereka; laporan media; dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk sejumlah negara tertentu. Amnesty International hanya melaporkan eksekusi, hukuman mati dan aspek lain dari penerapan hukuman mati, seperti komutasi dan pembebasan tuduhan, jika ada konfirmasi yang masuk akal. Di banyak negara, pemerintah tidak mempublikasikan informasi penerapan hukuman mati. Di Cina dan Vietnam, data penerapan hukuman mati diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Selama tahun 2020, hanya sedikit atau tidak ada informasi mengenai penerapan hukuman mati di beberapa negara – khususnya Laos dan Korea Utara (Republik Rakyat Demokratik Korea) – karena praktik negara yang membatasi.

Oleh karena itu, di banyak negara, angka penerapan hukuman mati Amnesty International berupa angka minimum. Angka sebenarnya cenderung lebih tinggi. Jika organisasi ini memperoleh informasi resmi terhadap suatu negara pada tahun tertentu maka akan dicatat dalam laporan.

Pada tahun 2009 Amnesty International berhenti mempublikasikan perkiraan angka penerapan hukuman mati di Cina, keputusan ini mencerminkan kekhawatiran tentang bagaimana pemerintah Cina salah mengartikan angka-angka Amnesty International. Amnesty International selalu menjelaskan bahwa angka yang dipublikasikan untuk Cina jauh lebih rendah daripada kenyataannya, karena pembatasan akses informasi. Cina belum mempublikasikan angka hukuman mati; namun, informasi yang tersedia menunjukkan bahwa setiap tahun ribuan orang dieksekusi dan dijatuhi hukuman mati. Amnesty International mengulangi seruannya terhadap pemerintah Cina untuk mempublikasikan informasi penerapan hukuman mati di Cina.

Jika Amnesty International menerima dan dapat memverifikasi informasi baru setelah penerbitan laporan ini, kami akan memperbarui angka penerapan hukuman mati secara online di [amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty](https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty).

Dalam tabel dan daftar, ada tanda "+" setelah angka di samping nama negara – misalnya, Malaysia (22+) – berarti Amnesty International mengonfirmasi 22 eksekusi, hukuman mati atau orang yang divonis mati di Malaysia tetapi percaya bahwa ada lebih dari 22 kasus. Jika tanda "+" muncul setelah nama negara tanpa angka – misalnya, Syria (+) – berarti Amnesty International membenarkan adanya eksekusi, hukuman mati atau orang yang divonis mati (lebih dari satu) di negara tersebut tetapi tidak memiliki informasi yang memadai untuk memberikan angka minimum yang kredibel. Saat menghitung total global dan regional, "+" dihitung sebagai 2, termasuk Cina.

Amnesty International menentang hukuman mati dalam semua kasus tanpa terkecuali terlepas dari sifat atau keadaan kejahatannya; rasa bersalah, tidak bersalah atau karakteristik lain orang yang divonis mati; atau metode yang digunakan negara untuk melakukan eksekusi. Organisasi ini menyampaikan kampanye penghapusan total hukuman mati.

# PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2020

***"Sistem peradilan pidana modern harus akurat, adil, manusiawi, dan tepat waktu. Pengalaman kami baru-baru ini dengan dimulainya kembali eksekusi oleh pemerintah federal menambah semakin banyak bukti bahwa hukuman mati tidak dapat diselaraskan dengan nilai-nilai tersebut."***

Stephen Breyer, Associate Justice Mahkamah Agung AS, 16 Juli 2020<sup>1</sup>

## TREN GLOBAL

Tahun 2020 ditandai dengan penurunan global penerapan hukuman mati, dan sementara pandemi COVID-19 berkontribusi terhadap berkurangnya jumlah eksekusi dan hukuman mati yang dilakukan, pandemi ini juga memperburuk kekejaman hukuman ini.



Jumlah eksekusi yang diketahui menurun sebesar 26% dibandingkan dengan total tahun 2019 yang merupakan penurunan dari tahun-ke-tahun yang tercatat sejak tahun 2015 dan sekali lagi mencapai angka terendah dalam 10 tahun lebih. Jumlah negara yang melakukan eksekusi yang diketahui (18) menurun 2 negara dibandingkan dengan tahun 2019 dan menegaskan bahwa upaya eksekusi terbatas pada sebagian kecil negara.

Penurunan signifikan terutama terkait dengan berkurangnya eksekusi di dua negara dengan riwayat angka eksekusi yang dilaporkan tinggi yaitu Irak dan Arab Saudi; dan selanjutnya ada penghentian sementara eksekusi dalam menanggapi pandemi Covid-19. Di AS, lonjakan eksekusi federal diseimbangkan dengan jumlah nasional sebagian besar karena penundaan eksekusi baru – atau pelaksanaan surat perintah yang lebih lambat – di beberapa negara bagian AS, sebagai konsekuensi dari pandemi Covid-19. Enam dari penangguhan hukuman mati yang diberikan di AS pada tahun 2020 secara khusus mengacu pada pandemi covid-19. Di

<sup>1</sup> Mahkamah Agung AS, *Barr v. Purkey*, (591 AS 2020), 16 Juli 2020, perbedaan pendapat.

Singapura, eksekusi ditunda karena proses litigasi, termasuk dampak pembatasan terkait Covid-19. Total hukuman mati yang baru dijatuhkan di seluruh dunia yang diketahui Amnesty International (setidaknya 1.477) turun 36% dibandingkan tahun 2019, sebagian karena pandemi Covid-19 menyebabkan gangguan dan penundaan proses pidana di seluruh dunia.

Namun, saat dunia berjuang untuk menangkis penyebaran virus dan melindungi nyawa orang, peningkatan yang mengkhawatirkan tercatat dalam upaya eksekusi di beberapa negara bagian. Mesir melipatgandakan lebih dari tiga kali lipat angka tahunannya, sementara di AS, pada bulan Juli pemerintahan Trump mengesahkan dan melanjutkan kembali eksekusi federal setelah 17 tahun, yang akhirnya menewaskan 10 orang selama lima setengah bulan. India, Oman, Qatar dan Taiwan juga melanjutkan pembunuhan oleh negara.

Dengan latar belakang dunia yang dilumpuhkan oleh pandemi, keputusan para pejabat di beberapa negara untuk mengabaikan tindakan kesehatan dan tanpa henti melanjutkan eksekusi dan hukuman mati menambah banyaknya kekejaman dalam penerapan hukuman mati dan membuat kasus penghapusannya semakin mendesak. Di antara contoh lain, pejabat AS di tingkat negara bagian dan federal berjuang melawan permintaan penundaan eksekusi untuk mengizinkan penasihat spiritual menemani narapidana melalui saat-saat terakhirnya, dan dengan melanjutkan eksekusi mereka menyebabkan pengacara, petugas lembaga pemasyarakatan, narapidana, dan orang lain yang berpartisipasi dalam proses tersebut berisiko tertular virus. Di Cina, Amnesty International yakin ribuan orang telah dieksekusi dan angkanya tetap menjadi rahasia negara, pejabat berwenang mengumumkan tindakan keras terhadap tindak kriminal yang memengaruhi upaya pencegahan Covid-19, mengizinkan pelacakan cepat kasus yang mengakibatkan setidaknya satu hukuman mati dilakukan dengan kecepatan yang mengerikan.

Ketika pejabat berwenang di banyak negara menanggukun kunjungan penjara dan proses pengadilan secara langsung untuk mengatasi pandemi, orang yang dijatuhi hukuman mati dibiarkan tanpa kontak sosial dalam waktu yang lama dan dengan akses terbatas ke penasihat hukum mereka. Dengan beberapa negara bagian memilih melanjutkan hukuman mati tidak peduli apa pun yang terjadi, pandemi tidak hanya menimbulkan risiko kesehatan yang tinggi bagi para narapidana dan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses tersebut, tetapi juga mengganggu akses ke penasihat hukum dan jaminan peradilan yang adil lainnya, yang merupakan perlindungan penting yang harus diperhatikan di semua kasus hukuman mati.

Perkembangan dari tahun 2020 juga mengkonfirmasi tren dari beberapa tahun terakhir yang melihat dunia membuat kemajuan berkelanjutan menuju penghapusan hukuman mati. Pada bulan Mei, Chad sepenuhnya menghapus hukuman mati, menjadi negara Afrika kelima yang melakukannya dalam dekade terakhir.<sup>2</sup> Pada bulan September, Kazakhstan menandatangani dan pada bulan Desember melakukan langkah-langkah untuk mengesahkan Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tentang Penghapusan Hukuman Mati. Tidak ada eksekusi yang tercatat di Bahrain, Belarusia, Jepang, Pakistan atau Sudan, semua negara yang melakukan eksekusi pada tahun 2019. Kazakhstan, Federasi Rusia, Tajikistan, Malaysia dan Gambia terus mengamati moratorium resmi eksekusi. Di AS, Colorado menjadi negara bagian abolisionis AS ke-22 dan moratorium yang dikeluarkan gubernur di California, Oregon dan Pennsylvania melanjutkan sepanjang tahun; Ohio menjadwalkan ulang semua rencana eksekusi.

Kemajuan selanjutnya adalah pada bulan Januari Barbados memutuskan pembaruan untuk mencabut hukuman mati yang bersifat wajib; dan pada bulan April, pemerintah Arab Saudi mengumumkan bahwa negara ini akan mengakhiri penerapan hukuman mati terhadap orang berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan dalam kasus yang tidak melibatkan undang-undang kontra-teror. Pada bulan Juli, pejabat berwenang di Sudan menghapus penerapan hukuman mati bagi orang murtad.

Pada bulan Desember, sidang pleno Majelis Umum PBB (UNGA) mencatat rekor jumlah negara (123) yang mendukung penerapan keputusan dua tahunan yang menyerukan penetapan

---

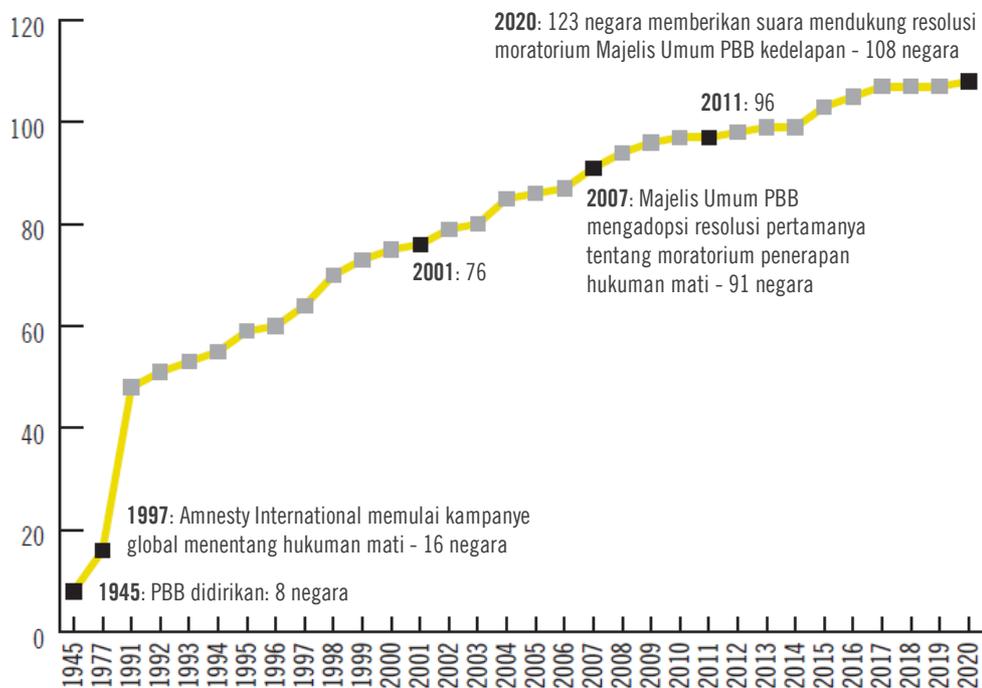
<sup>2</sup> Lihat daftar negara abolisionis dan retensionis di Lampiran II dokumen ini.

moratorium eksekusi dengan maksud untuk sepenuhnya menghapus hukuman mati<sup>3</sup> – meningkat 19 suara dibandingkan tahun 2007, ketika keputusan UNGA pertama tentang masalah ini diterapkan. Djibouti, Yordania, Lebanon dan Korea Selatan mendukung seruan PBB atas moratorium eksekusi untuk pertama kalinya. Kongo (Republik), Guinea, Nauru, dan Filipina, yang tidak memberikan suara atau menentang keputusan tahun 2018, juga mendukungnya, sementara Yaman dan Zimbabwe beralih dari menentang menjadi tidak memberikan suara.<sup>4</sup>

Meskipun ada beberapa kemunduran dan tantangan lain terkait pandemi Covid-19, perjalanan dunia menuju penghapusan hukuman mati secara global harus terus berlanjut. Sekarang sangat penting dibanding sebelumnya bahwa langkah-langkah lebih lanjut dilakukan di semua tingkatan untuk memastikan bahwa semua kemajuan akan tetap dilanjutkan di tahun 2021.

Amnesty International menentang hukuman mati dalam semua kasus tanpa terkecuali terlepas dari sifat atau keadaan kejahatannya; bersalah, tidak bersalah atau karakteristik lain orang yang divonis mati; atau metode yang digunakan oleh negara untuk melakukan eksekusi.

## JUMLAH NEGARA ABOLISIONIS (1945-2020)



## EKSEKUSI

Setidaknya 483 orang dieksekusi pada tahun 2020, angka terendah yang dicatat Amnesty International setidaknya dalam satu dekade.<sup>5</sup> Eksekusi turun 26% dibandingkan tahun 2019, ketika 657 orang terdaftar untuk dieksekusi; dan turun 70% dari jumlah yang tinggi, yaitu sebesar 1.634 eksekusi yang dilaporkan pada tahun 2015. Tahun 2020 merupakan tahun ketiga

3 Keputusan Majelis Umum PBB 75/183 tanggal 16 Desember 2020

4 Lihat catatan pemungutan suara di Lampiran IV dokumen ini; dan Amnesty International, —PBB: Perlawanan terhadap hukuman mati terus bertambah, 16 Desember 2020, [amnesty.org/en/latest/news/2020/12/un-opposition-to-the-death-penalty-continues-to-grow/](https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/un-opposition-to-the-death-penalty-continues-to-grow/)

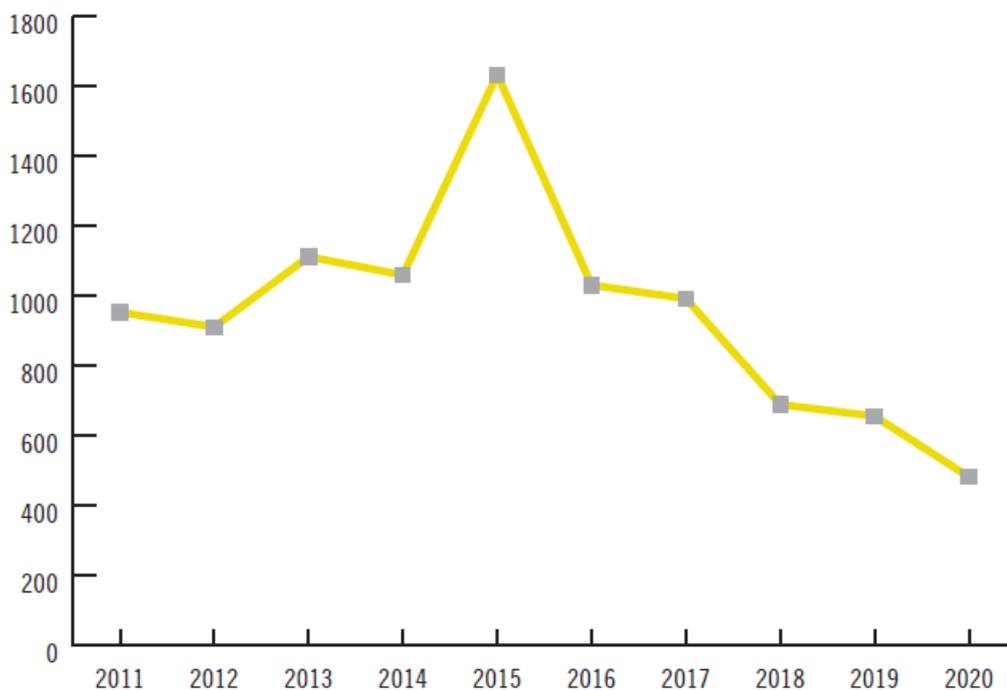
5 Jumlah total eksekusi yang dilaporkan untuk tahun 2020 merupakan salah satu angka terendah yang dicatat oleh Amnesty International pada tahun tertentu sejak mulai memantau penerapan hukuman mati pada tahun 1979. Namun, perubahan akses informasi, konfigurasi negara dan metodologi selama beberapa dekade menimbulkan kesulitan dalam membandingkan angka ini secara akurat dalam periode yang lebih lama.

berturut-turut di mana Amnesty International mencatat angka eksekusi terendah dalam periode 10 tahun.

Empat negara - Iran (setidaknya 246), Mesir (setidaknya 107), Irak (setidaknya 45) dan Arab Saudi (27) - menyumbang 88% dari semua eksekusi yang diketahui. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jumlah total global yang tercatat tidak termasuk ribuan eksekusi yang diyakini Amnesty International dilakukan di Cina, di mana data tentang hukuman mati diklasifikasikan sebagai rahasia negara.<sup>6</sup> Angka tersebut juga dipengaruhi oleh sangat terbatasnya akses informasi Amnesty International terhadap dua negara lain, Korea Utara dan Vietnam, yang juga diyakini menerapkan hukuman mati secara ekstensif.

Amnesty International mencatat 16 perempuan juga termasuk di antara 483 orang yang diketahui telah dieksekusi pada tahun 2020 (3%), sebagai berikut: Mesir (4), Iran (9), Oman (1) dan Arab Saudi (2).

## EKSEKUSI GLOBAL YANG TERCATAT (2011-2020)



Dua negara yang terutama bertanggung jawab atas penurunan global dalam eksekusi mati dibandingkan dengan tahun 2019: Irak memangkas lebih dari separuh total eksekusi tahunannya (dari setidaknya 100 pada tahun 2019 menjadi setidaknya 45 pada tahun 2020) dan Arab Saudi mengurangi eksekusi sebesar 85%, dari 184 menjadi 27. Sebaliknya, Mesir melipatgandakan eksekusi yang dilaporkan lebih dari tiga kali lipat (dari setidaknya 32 menjadi setidaknya 107) dan mencapai total tertinggi sejak puncaknya pada tahun 2013, ketika negara ini melakukan setidaknya 109 eksekusi.

<sup>6</sup> Pada tahun 2009, Amnesty International berhenti mempublikasikan perkiraan angka penerapan hukuman mati di Cina. Sebaliknya, organisasi ini menantang pihak berwenang yang membuktikan klaim mereka bahwa mencapai tujuan mereka, yaitu tujuan mengurangi



## EKSEKUSI TERCATAT SECARA GLOBAL PADA TAHUN 2020

Bangladesh (2), Botswana (3), Cina (+), Mesir (107+), India (4), Iran (246+), Irak (45+), Korea Utara (+), Oman (4), Qatar (1), Arab Saudi (27), Somalia (11+), Sudan Selatan (2+), Suriah (+), Taiwan (1), AS (17), Vietnam (+), Yaman (5+).

Amnesty International mencatat eksekusi di 18 negara, dua lebih sedikit dari tahun 2019. Tidak ada eksekusi yang diketahui dilakukan di Belarus, Jepang, Pakistan, Singapura atau Sudan - semua negara yang mengeksekusi orang dalam dua tahun sebelumnya - serta di Bahrain, yang telah melakukan eksekusi pada tahun 2019 tetapi tidak melakukan eksekusi pada tahun 2018.

India, Oman, dan Qatar kembali melakukan eksekusi setelah beberapa tahun tanpa ada eksekusi, sementara Taiwan mengeksekusi satu orang setelah satu tahun absen. Otoritas federal AS kembali melakukan eksekusi setelah hampir dua dekade, sementara di tingkat negara bagian eksekusi ditunda selama beberapa bulan. Mirip dengan tahun 2019, Amnesty International dapat mengonfirmasi bahwa eksekusi yudisial terjadi di Suriah, tetapi tidak memiliki informasi yang memadai untuk memberikan angka minimum yang kredibel.

## METODE EKSEKUSI PADA TAHUN 2020<sup>7</sup>

HUKUMAN PEMENGALAN	Arab Saudi								
HUKUMAN SENGATAN LISTRIK	AS								
HUKUMAN GANTUNG	Bangladesh	Botswana	Mesir	India	Iran	Irak	Sudan Selatan	Suriah	
SUNTIK MATI	Cina	AS	Vietnam						
HUKUMAN PENEMBAKAN	Cina	Iran	Korea Utara	Oman	Qatar	Somalia	Taiwan	Yaman	

## NEGARA PENGEKSEKUSI YANG DIKETAHUI OLEH ORGANISASI PEMERINTAH INTERNASIONAL PADA TAHUN 2020

**Organisasi Negara-Negara Amerika:** 1 dari 35 negara melaksanakan eksekusi – AS.

**Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa:** 1 dari 57 negara mengeksekusi orang – AS.

**Uni Afrika:** 4 dari 55 negara melakukan eksekusi - Botswana, Mesir, Somalia dan Sudan Selatan.

**Liga Negara-Negara Arab:** 8 dari 22 negara mengeksekusi orang - Mesir, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Suriah dan Yaman.

**Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara:** 1 dari 10 negara melakukan eksekusi - Vietnam.

**Persemakmuran:** 3 dari 54 negara mengeksekusi orang - Bangladesh, Botswana dan India.

**Organisasi Internasional Frankofoni:** 2 dari 54 negara melakukan eksekusi - Mesir dan Vietnam.

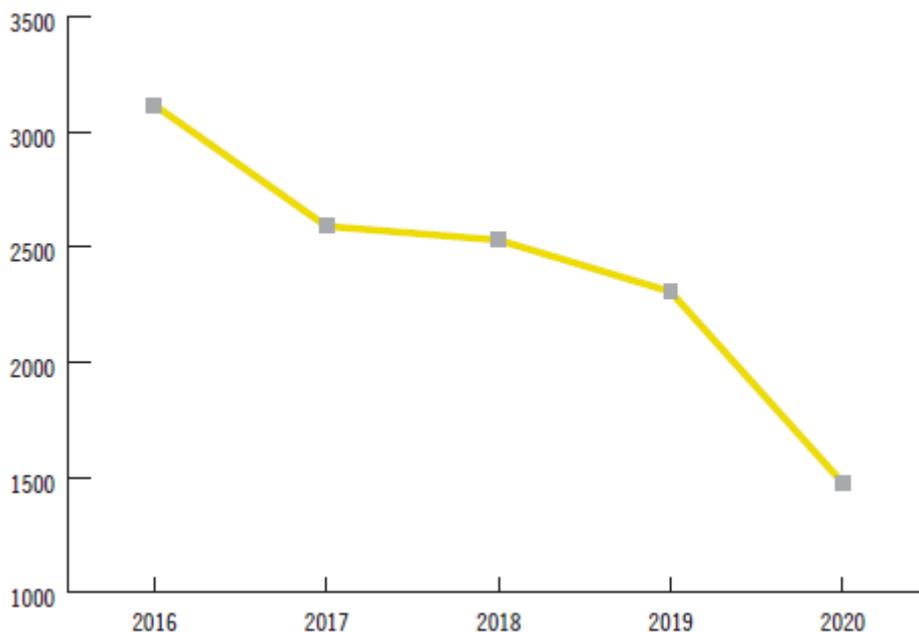
**Perserikatan Bangsa-Bangsa:** 17 dari 193 negara anggota (9% dari keanggotaan PBB) diketahui telah mengeksekusi orang.

<sup>7</sup> Sejalan dengan tahun-tahun sebelumnya, Amnesty International tidak menerima laporan eksekusi yudisial dengan rajam pada tahun 2020.

# HUKUMAN MATI

Amnesty International mencatat penurunan secara signifikan dalam jumlah hukuman mati baru yang diketahui telah dijatuhkan secara global pada tahun 2020 (setidaknya 1.477), turun 36% dibandingkan tahun 2019 (setidaknya 2.307) dan sebesar 53% pada tahun 2016 (setidaknya 3.117).

## HUKUMAN MATI GLOBAL YANG TERCATAT



Variasi dalam sifat dan ketersediaan informasi tentang hukuman mati di beberapa negara tetap memengaruhi penilaian dan kemampuan Amnesty International dalam membandingkan tren secara akurat terkait negara. Amnesty International tidak menerima angka hukuman mati yang dijatuhkan pada tahun 2020 dari pejabat di Malaysia, Nigeria dan Sri Lanka, negara-negara yang sebelumnya melaporkan jumlah resmi hukuman mati yang tinggi pada tahun-tahun sebelumnya. Pengungkapan sebagian oleh pihak berwenang Vietnam menunjukkan bahwa ratusan orang terus dijatuhi hukuman mati setiap tahun, meskipun angka yang komprehensif tidak tersedia untuk umum.



### CATATAN HUKUMAN MATI DI DUNIA PADA TAHUN 2020

Afghanistan (4+), Aljazair (1+), Bahrain (3), Bangladesh (113+), Belarusia (3), Botswana (1), Kamerun (1+), Cina(+), Komoro (1), Republik Demokratik Kongo (20+), Mesir (264+), Gambia (1), Ghana (3), India (77), Indonesia (117+), Iran (+), Irak (27+), Jepang (3), Yordania (2+), Kenya (+), Kuwait (2+), Laos (9+), Lebanon (1+), Libya (17+), Malawi (2+), Malaysia (22+), Mali (30), Mauritania (1+), Maroko/Sahara Barat (1+), Myanmar (1), Niger (3), Nigeria (58+), Korea Utara (+), Pakistan (49+), Palestina (Negara, 17+), Qatar (4+), Arab Saudi (8+), Sierra Leone (39), Singapura (8), Somalia (+), Sudan Selatan (6+), Sri Lanka (16+), Sudan (10+), Suriah (+), Taiwan (5), Thailand (35), Trinidad dan Tobago (2), Tunisia (8+), Uni Emirat Arab (4+), AS (18), Vietnam (54+), Yaman (269+), Zambia (119) dan Zimbabwe (6).

Sembilan belas perempuan diketahui telah dijatuhi hukuman mati pada tahun 2020 di Bangladesh (2), Indonesia (4), Laos (4), Taiwan (1), Thailand (1) dan Vietnam (7). Namun, Amnesty International tidak dapat memperoleh rincian gender yang akurat untuk beberapa negara, termasuk negara yang diyakini menggunakan hukuman mati secara ekstensif, seperti Iran dan Arab Saudi, yang berarti angka ini bisa lebih tinggi.

Dua negara lebih sedikit (54) diketahui telah menjatuhkan hukuman mati pada tahun 2020, dibandingkan dengan tahun 2019 (56). Memang, meski Kamerun, Komoro, Laos dan Libya tercatat telah menjatuhkan hukuman mati pada tahun 2020, dan tidak melakukannya pada tahun sebelumnya, tidak ada hukuman mati baru yang tercatat di Guyana, Maladewa, Oman, Korea Selatan, Tanzania dan Uganda di tahun 2020, setelah mereka menjatuhkan beberapa hukuman mati pada tahun 2019.

Amnesty International mencatat penurunan jumlah hukuman mati baru yang dijatuhkan di 30 dari 54 negara di mana hukuman mati diketahui telah dijatuhkan, yang tampaknya terkait dalam banyak kasus dengan pembatasan proses peradilan yang diberlakukan di beberapa negara sebagai respons terhadap pandemi Covid-19. Hukuman mati terutama menurun di Bangladesh (dari setidaknya 220 menjadi setidaknya 113), Mesir (dari setidaknya 435 menjadi setidaknya 264), India (dari 102 menjadi 77), Irak (dari setidaknya 87 menjadi setidaknya 27), Kenya (dari setidaknya 29 menjadi +), Lebanon (dari 23 menjadi setidaknya 1), Pakistan (dari setidaknya 632 menjadi setidaknya 49), Somalia (dari setidaknya 24 menjadi +), dan AS (35 menjadi 18).

Peningkatan tercatat di 13 negara: Republik Demokratik Kongo (dari 8 pada tahun 2019 menjadi setidaknya 20 pada tahun 2020), Indonesia (dari setidaknya 80 menjadi setidaknya 117), Jepang (dari 2 menjadi 3), Mali (dari setidaknya 4 menjadi 30), Nigeria (dari setidaknya 54 menjadi setidaknya 58), Palestina (Negara, dari 4 menjadi setidaknya 17), Qatar (dari setidaknya 2 menjadi setidaknya 4), Arab Saudi (dari setidaknya 5 menjadi setidaknya 8), Sierra Leone (dari 21 menjadi 39), Sudan Selatan (dari setidaknya 4 menjadi setidaknya 6), Thailand (dari setidaknya 16 menjadi 35), Yaman (dari 55 menjadi setidaknya 269) dan Zambia (dari 101 menjadi 119).



## TERANCAM HUKUMAN MATI

Pada akhir tahun 2020, setidaknya 28.567 orang diketahui terancam hukuman mati. Sembilan negara menyumbang 82% dari jumlah yang diketahui: Irak (7.900+), Pakistan (4.000+), Nigeria (2.700+), AS (2.485), Bangladesh (1.800+), Malaysia (1.314+), Vietnam (1.200+), Kenya (1.000+), Sri Lanka (1.000+).

Amnesty International yakin sejumlah besar tahanan terancam hukuman mati di beberapa negara lain, tetapi angkanya tidak tersedia atau tidak mungkin memperkirakan jumlah yang memadai. Ini meliputi Cina, Mesir, Iran, Korea Utara dan Arab Saudi.

Bahkan untuk negara-negara yang tersedia angkanya, dalam banyak kasus tidak mungkin mendapatkan uraian berdasarkan gender. Amnesty International dapat mengkonfirmasi angka tentang perempuan yang terancam hukuman mati (113) di Ghana (5), Jepang (7), Maladewa (1), Taiwan (2), Thailand (26, semua dihukum karena pelanggaran terkait narkoba), AS (48) dan Zambia (24).

# ASIA-PACIFIC

## TREN REGIONAL

- Kerahasiaan di Cina, Korea Utara, dan Vietnam masih menghalangi penilaian yang akurat tentang penerapan hukuman mati di wilayah yang memiliki jumlah eksekusi tertinggi.
- India dan Taiwan kembali melakukan eksekusi setelah jeda masing-masing selama empat tahun dan satu tahun; Malaysia tetap mematuhi moratorium resmi eksekusi.
- Jepang, Pakistan dan Singapura tidak melaporkan satu pun eksekusi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun.

NEGARA	EKSEKUSI TERCATAT TAHUN 2020	HUKUMAN MATI TERCATAT 2020	ORANG YANG DIKETAHUI TERANCAM HUKUMAN MATI PADA AKHIR TAHUN 2020
AFGANISTAN	0	4+	976
BANGLADESH	2	113+	1.800+
BRUNEI DARUSSALAM	0	0	+
CINA	+	+	+
INDIA <sup>8</sup>	4	77	404
INDONESIA	0	117+	482+
JEPANG	0	3	120
LAOS	0	9+	+
MALAYSIA	0	22+	1.314+
MALADEWA	0	0	19
MYANMAR	0	1	+
KOREA UTARA	+	+	+
PAKISTAN	0	49+	4.000+
PAPUA NUGINI	0	0	20
SINGAPURA	0	8	50+
KOREA SELATAN	0	0	60
SRILANKA	0	16+	1.000+
TAIWAN	1	5	49
THAILAND	0	35	235
TONGA	0	0	0
VIET NAM	+	54 +	1.200+

Amnesty International yakin enam negara Asia-Pasifik melakukan eksekusi pada tahun 2020, jumlah terendah yang tercatat. Tapi, kami hanya dapat mengkonfirmasi angka eksekusi di Bangladesh, India dan Taiwan - karena kerahasiaan di Cina, Korea Utara dan Vietnam tidak memungkinkan untuk memverifikasi laporan dan menilai upaya pembunuhan oleh negara yang sebenarnya di wilayah tersebut, yang diyakini terus terjadi pada ribuan orang.

<sup>8</sup> Project 39A, Hukuman Mati di India: Laporan Statistik Tahunan 2020, Januari 2021, [project39a.com/annual-statistics-2020](https://project39a.com/annual-statistics-2020); Amnesty International memantau perkembangan harian tentang penerapan hukuman mati di India, tetapi mengumpulkan jumlah hukuman mati yang lebih sedikit untuk tahun 2020.

Jumlah hukuman mati baru yang tercatat pada tahun 2020 (517) lebih dari setengah dibandingkan dengan 2019, yang tercatat 1.227. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan signifikan laporan hukuman mati yang dikumpulkan dari India (dari 102 pada 2019 menjadi 77 pada 2020), Pakistan (dari 632+ menjadi 49+) dan Bangladesh (dari 220+ menjadi 113+). Angka-angka ini dan jumlah regionalnya dipengaruhi oleh penangguhan sementara proses pengadilan yang diberlakukan sebagai respons terhadap pandemi Covid-19, yang juga membuat beberapa negara memperkenalkan pedoman prosedural baru untuk memungkinkan proses peradilan jarak jauh atau memprioritaskan pengadilan non-kapital (non-pembunuhan) selama *lockdown*.<sup>9</sup>

Jumlah negara yang menjatuhkan hukuman mati (16) tetap sama dengan 2019 (17). Laporan hukuman mati dicatat di Laos, di mana tidak ada laporan yang tersedia untuk tahun sebelumnya; dan tidak ada hukuman mati baru yang dilaporkan di Maladewa dan Korea Selatan, yang telah menjatuhkan hukuman mati pada tahun 2019.

Dalam banyak kasus, penerapan hukuman mati di kawasan Asia-Pasifik terus melanggar hukum dan standar internasional. Hukuman mati digunakan secara luas untuk pelanggaran yang tidak memenuhi ambang batas —kejahatan paling serius di mana penerapan hukuman mati harus dibatasi berdasarkan hukum internasional.<sup>10</sup> Ini meliputi pelanggaran terkait narkoba; kejahatan ekonomi, seperti korupsi; dan perbuatan yang tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenali sesuai dengan persyaratan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, seperti —penistaan agama. Orang yang berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan terjadi tetap terancam hukuman mati di Maladewa. Dalam banyak kasus yang dicatat oleh Amnesty International, hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan khusus.

## PERKEMBANGAN NEGARA YANG PATUT DIPERHATIKAN

Untuk tahun kedua, tidak ada eksekusi yang tercatat di **Afghanistan**. Sebagai bagian dari persiapan pembicaraan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban, mulai Agustus pihak berwenang membebaskan 156 tahanan yang telah dijatuhi hukuman mati.<sup>11</sup> Amnesty International mencatat laporan tentang empat hukuman mati baru yang dijatuhkan pada Maret karena penculikan dan pembunuhan, tetapi tidak ada angka resmi.<sup>12</sup>

Dua eksekusi dilakukan di **Bangladesh**. Seorang pria yang didakwa atas pembunuhan Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Presiden pertama negara ini yang telah melarikan diri selama dua dekade, digantung pada bulan April.<sup>13</sup> Narapidana lain, yang didakwa atas pembunuhan dua orang, dieksekusi pada November.<sup>14</sup> Pada bulan Oktober, Pengadilan Pidana Internasional —sebuah pengadilan di Bangladesh yang dibentuk untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia skala besar yang dilakukan selama Perang Kemerdekaan Bangladesh tahun 1971, mengeluarkan surat perintah eksekusi terhadap Syed Mohammad Kaiser, setelah Mahkamah Agung negara ini mengesahkan hukuman matinya pada bulan Januari.<sup>15</sup> Hingga tahun 2020 berakhir, banding atas namanya masih menunggu putusan.

Amnesty International mencatat adanya 113 vonis hukuman mati baru untuk kasus pembunuhan. Dua perempuan termasuk di antara mereka yang mendapat vonis ini. Dari total

---

9 Penangguhan sementara proses pidana tercatat di beberapa negara, termasuk Afghanistan, Bangladesh, India, Malaysia, Maladewa, Pakistan dan Sri Lanka.

10 Lihat hal. 13 dalam ikhtisar umum global untuk informasi lebih rinci.

11 Al Jazeera, —Afghanistan mulai membebaskan 400 tahanan Taliban, 14 Agustus 2020, [aljazeera.com/news/2020/8/14/afghanistan-begins-release-of-400-taliban-prisoners](https://www.aljazeera.com/news/2020/8/14/afghanistan-begins-release-of-400-taliban-prisoners); TOLONews, —Semua penghalang dihapus untuk pembicaraan intra-Afghanistan: Ghani, 20 Agustus 2020, [tolonews.com/afghanistan/all-barriers-removed-intra-afghan-talks-ghani](https://www.tolonews.com/afghanistan/all-barriers-removed-intra-afghan-talks-ghani)

12 TOLONews, —4 pria dihukum mati karena penculikan dan pembunuhan, 8 Maret 2020, [tolonews.com/afghanistan/4-men-convicted-kidnapping-and-murder-sentenced-death](https://www.tolonews.com/afghanistan/4-men-convicted-kidnapping-and-murder-sentenced-death)

13 Dhaka Tribune, —Seorang buronan selama lebih dari 20 tahun, Majed ditangkap pada hari Selasa, 12 April 2020, [dhakatribune.com/bangladesh/2020/04/12/bangabandhu-killer-majed-hanged](https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/04/12/bangabandhu-killer-majed-hanged)

14 United News of Bangladesh, —Pembunuhan ganda Laxmipur: Terpidana dihukum gantung di Penjara Kashimpur, 2 November 2020, [unb.com.bd/category/Bangladesh/laxmipur-double-murder-condemned-convict-hanged-at-kashimpur-jail/59842](https://www.unb.com.bd/category/Bangladesh/laxmipur-double-murder-condemned-convict-hanged-at-kashimpur-jail/59842)

15 Prothom Alo, —Kejahatan terhadap kemanusiaan: Surat perintah eksekusi mati terhadap Syed Mohamamd Kaiser, 22 Oktober 2020, [en.prothomalo.com/bangladesh/crime-and-law/crimes-against-humanity-death-warrant-issued-against-syed-mohamamd-kaiser](https://www.en.prothomalo.com/bangladesh/crime-and-law/crimes-against-humanity-death-warrant-issued-against-syed-mohamamd-kaiser)

113 vonis, 21 pria dan satu perempuan dijatuhi vonis tanpa kehadiran mereka di persidangan; dan 60 vonis hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan khusus.<sup>16</sup> Pada tanggal 13 Oktober, Presiden Mohammad Abdul Hamid menandatangani peraturan yang mengubah Undang-Undang Pencegahan Penindasan Perempuan dan Anak, 2000, untuk memungkinkan hukuman mati sebagai hukuman untuk tindak pemerkosaan.<sup>17</sup>

**Cina** tetap menjadi algojo utama dunia, dengan tetap mengklasifikasikan angka eksekusi dan hukuman mati sebagai rahasia negara dan menghalangi pengawasan independen. Meski ada kemungkinan pengurangan penerapan hukuman mati dalam beberapa tahun terakhir, Amnesty International yakin bahwa jumlah hukuman mati yang dijatuhkan dan eksekusi yang dilakukan pada tahun 2020 tetap mencapai ribuan. Amnesty International terus meminta pihak berwenang Cina untuk transparan dan membuat rincian lengkap informasi seperti itu tersedia untuk umum.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemantauan Amnesty International menunjukkan bahwa hukuman mati, dalam banyak kasus, digunakan untuk menghukum kasus pembunuhan dan pelanggaran terkait narkoba, dari 46 pelanggaran yang mana hukuman tersebut masih berlaku. Di antara pelanggaran ini, perbuatan non-kekerasan yang tidak memenuhi kriteria 'kejahatan paling serius' menurut hukum dan standar internasional banyak ditemukan. Amnesty International tidak dapat memantau apakah hukuman mati atau eksekusi dijatuhkan dan dilaksanakan di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang (XUAR), tempat di mana hukuman mati diketahui telah digunakan secara diam-diam pada tahun-tahun sebelumnya setelah melalui proses hukum yang sangat tidak adil, sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai kampanye "Perang Rakyat" dan "Protes keras", yang berdampak terhadap mayoritas masyarakat Muslim di wilayah tersebut.

Pada tahun 2020, saat berjuang melawan pandemi Covid-19, pihak berwenang Cina tampaknya, sekali lagi, menggunakan hukuman mati untuk mengirim pesan kepada publik, dengan menunjukkan ketergantungan yang berlebihan pada argumen keliru bahwa hukuman mati memiliki efek jera yang unik, dan tidak berupaya untuk mempromosikan percakapan nasional tentang isu hak asasi manusia terkait penerapan hukuman ini. Pada tanggal 3 Februari Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Heilongjiang mengumumkan bahwa mereka akan menghukum berat, termasuk menghukum mati, 36 kejahatan terkait pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19.<sup>18</sup> Pada tanggal 7 Februari, Komisi Kesehatan Nasional, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keamanan Umum mengeluarkan panduan bersama untuk 'menindak keras perbuatan kriminal dan melanggar hukum terkait medis selama periode pencegahan dan pengendalian pandemi', yang memerintahkan agar penyelidikan dan penuntutan kejahatan terhadap staf medis dan terkait dengan gangguan terhadap kegiatan medis dilacak dengan cepat dan dihukum berat, termasuk dengan hukuman mati.<sup>19</sup> Pedoman tersebut diterbitkan menyusul adanya pembunuhan terhadap dua orang yang menegakkan peraturan pembatasan perjalanan yang diberlakukan sebagai respons terhadap epidemi, beberapa hari sebelumnya.<sup>20</sup>

Dalam sebuah kasus simbolik, seorang pria diadili dengan cepat atas insiden ini dan pada tanggal 1 Maret dijatuhi hukuman mati; banding pertamanya ditolak empat minggu kemudian dan pada 9 Juli, Mahkamah Agung Rakyat mengumumkan bahwa mereka telah meninjau kasusnya dan mengizinkan eksekusi, yang dilakukan hanya lima bulan setelah kejahatan itu

---

16 Seperti pengadilan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Kejahatan Gangguan Hukum dan Ketertiban (Pengadilan Cepat), 2002. Pelapor Khusus PBB untuk eksekusi di luar hukum, eksekusi singkat atau sewenang-wenang menyatakan bahwa pengadilan militer dan khusus lainnya —tidak sesuai untuk memastikan kepatuhan sepenuhnya terhadap standar peradilan yang adil sebagaimana disyaratkan dalam kasus-kasus hukuman mati dan —seharusnya tidak berwenang untuk menjatuhkan hukuman mati. Laporan Pelapor Khusus tentang eksekusi di luar hukum, eksekusi singkat atau sewenang-wenang, 9 Agustus 2012, UN Doc. A/67/275, paragraf 33.

17 [bdnews24.com](http://bdnews24.com), —Presiden Hamid menandatangani peraturan tentang hukuman mati dalam kasus pemerkosaan, 13 Oktober 2020, [bdnews24.com/bangladesh/2020/10/13/president-hamid-signs-ordinance-on-capital-punishment-in-rape-cases](http://bdnews24.com/bangladesh/2020/10/13/president-hamid-signs-ordinance-on-capital-punishment-in-rape-cases)

18 Global Times, —Bangsa memerangi kejahatan terkait epidemi, 4 Februari 2020, [globaltimes.cn/content/1178487.shtml](http://globaltimes.cn/content/1178487.shtml)

19 State Council, —[nhc.gov.cn/zygj/s7658/202002/4bb1763555f7443fa7d1b974bd417f4a.shtml](http://nhc.gov.cn/zygj/s7658/202002/4bb1763555f7443fa7d1b974bd417f4a.shtml), 8 Februari 2020,

20 Global Times, —Pria Cina ditangkap karena membunuh relawan pengendali COVID-19, 8 Februari 2020, [globaltimes.cn/page/202102/1215327.shtml](http://globaltimes.cn/page/202102/1215327.shtml)

dilakukannya.<sup>21</sup> Amnesty International prihatin dengan cepatnya persidangan itu, yang menimbulkan pertanyaan apakah jaminan peradilan internasional yang adil diterapkan dalam kasusnya.

Upaya eksekusi untuk mengirim pesan kepada publik, seperti yang terlihat dalam konteks respons terhadap pandemi Covid-19, mencerminkan pola yang telah lama dicatat oleh Amnesty International sehubungan dengan pelanggaran terkait narkoba. Sekali lagi pada tahun 2020, pihak berwenang Cina tampaknya meningkatkan jumlah laporan yang diterbitkan tentang eksekusi di media Cina menjelang Hari Internasional Anti Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Gelap yang ditetapkan dan dikampanyekan oleh PBB, pada 26 Juni. Untuk menandai kejadian tersebut, Mahkamah Agung Rakyat menerbitkan pedoman baru yang menyoroti 10 'kasus ilustrasi' yang berkaitan dengan pelanggaran yang melibatkan narkoba dan 'menjamin adanya hukuman berat'.<sup>22</sup> Tiga kasus menghasilkan empat eksekusi pada 21 April, dan 15 dan 17 Juni. Panduan tersebut dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada pengadilan dengan tingkat lebih rendah mengenai karakteristik kejahatan atau pelaku yang harus dianggap memberatkan, tetapi secara efektif mempromosikan pendekatan hukuman yang melanggar hak asasi manusia atas nama pengendalian narkoba dan, sebagaimana ditunjukkan dalam studi PBB baru-baru ini, memiliki efek mengerikan tertentu terhadap kelompok masyarakat yang paling terpinggirkan.<sup>23</sup>

Pelanggaran ekonomi, seperti penggelapan, tetap dihukum mati. Setidaknya satu hukuman mati baru yang 'ditangguhkan' - dengan kemungkinan keringanan hukuman setelah dua tahun - dijatuhkan terhadap dakwaan korupsi.<sup>24</sup> Pada 26 Desember, Kongres Rakyat Nasional mengesahkan amandemen Hukum Pidana dengan memasukkan hukuman mati sebagai hukuman atas kejahatan yang dilakukan oleh pejabat non-negara jika jumlah uang yang terlibat 'sangat besar'.<sup>25</sup> Hukuman mati sudah menjadi hukuman yang diterapkan terhadap pejabat yang dihukum karena kejahatan ini.

Pada tanggal 4 Agustus, Mahkamah Agung Rakyat membebaskan seorang pria setelah proses sidang ulang karena kurangnya bukti.<sup>26</sup> Dia dinyatakan bersalah karena pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati dengan skorsing dua tahun di Provinsi Jiangxi pada tahun 1995. Dia tidak diwakili oleh pengacara dan menyatakan bahwa "pengakuan"-nya telah diperoleh melalui penyiksaan.

Pihak berwenang **India** melakukan pelaksanaan hukum mati pertamanya di negara tersebut sejak tahun 2015 pada bulan Maret, menghukum mati empat pria yang dinyatakan bersalah pada kasus pemerkosaan yang menyita perhatian publik dan disertai pembunuhan, terhadap seorang wanita di Delhi pada tahun 2012. Berdasarkan angka pada Project 39A di National Law University, Delhi, jumlah vonis hukuman mati yang dijatuhkan di India pada tahun 2020 (77) terus menurun dari tahun-tahun sebelumnya, berkurang seperempat pada tahun 2019 (102) dan turun di bawah 100 untuk pertama kalinya sejak tahun 2015. Semua vonis hukuman mati yang dijatuhkan terkait pembunuhan atau pelanggaran yang melibatkan pembunuhan, kecuali empat pelanggaran hukum yang terkait dengan pemerkosaan anak.

---

21 Mahkamah Agung Rakyat, — 红 对 马 执 , 9 Juli 2020, [court.gov.cn/zixun-xiangqing-240251.html](http://court.gov.cn/zixun-xiangqing-240251.html)

22 Mahkamah Agung Rakyat, — 发 2020 , 24 Juni 2020, [szsyz.chinacourt.gov.cn/article/detail/2020/06/id/5318300.shtml](http://szsyz.chinacourt.gov.cn/article/detail/2020/06/id/5318300.shtml)

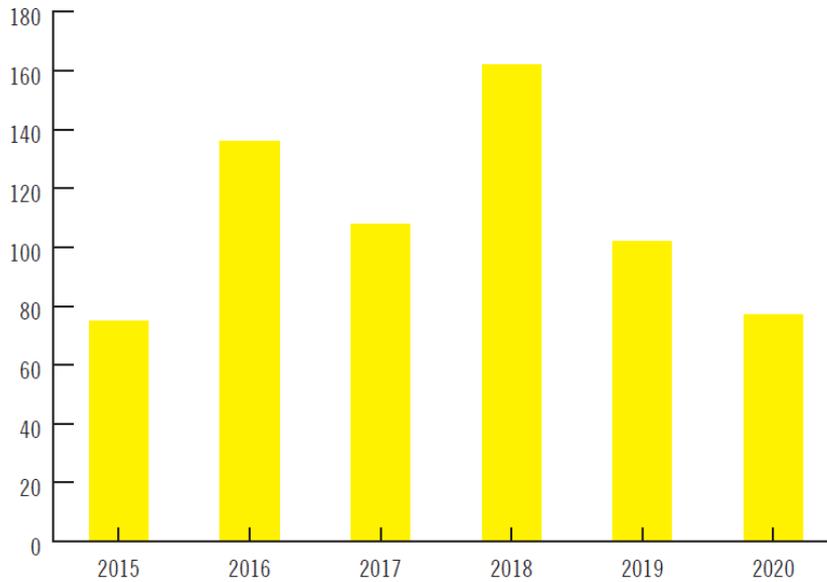
23 Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Kajian tentang dampak masalah narkoba dunia terhadap penikmatan hak asasi manusia, 4 September 2015, UN Doc. A/HRC/30/65; Implementasi komitmen bersama untuk secara efektif menangani dan melawan masalah narkoba dunia terkait dengan hak asasi manusia, 14 September 2018, UN Doc. A/HRC/39/39.

24 South China Morning Post, —Gubernur provinsi China dijatuhi hukuman mati yang ditangguhkan karena terlibat dalam skandal korupsi besar, 31 Juli 2020, [scmp.com/news/china/politics/article/3095595/chinese-provincial-chief-given-suspended-death-sentence-role](http://scmp.com/news/china/politics/article/3095595/chinese-provincial-chief-given-suspended-death-sentence-role)

25 NPC Observer, —Amandemen Hukum Pidana (XI) Republik Rakyat Cina, [npcobserver.com/legislation/criminal-law-amendment-xi/](http://npcobserver.com/legislation/criminal-law-amendment-xi/); amandemen tersebut berlaku efektif mulai 1 Maret 2021.

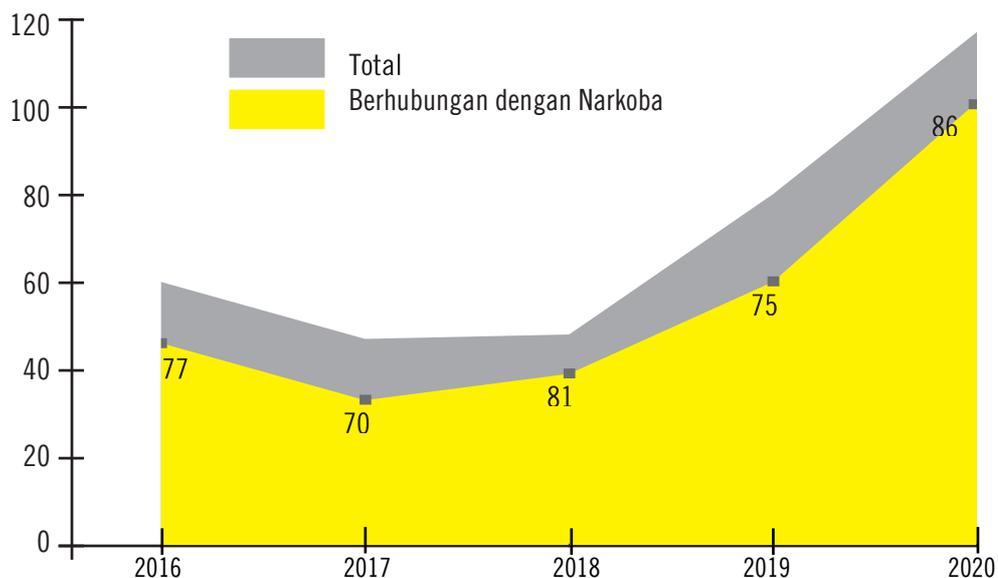
26 South China Morning Post, —Kasus Zhang Yuhuan menunjukkan kebutuhan China untuk mencegah hukuman yang tidak sah, 9 Agustus 2020, [scmp.com/comment/opinion/article/3096430/zhang-yuhuan-case-shows-chinas-need-prevent-wrongful-convictions](http://scmp.com/comment/opinion/article/3096430/zhang-yuhuan-case-shows-chinas-need-prevent-wrongful-convictions)

## VONIS HUKUMAN MATI BARU YANG TERCATAT DI INDIA (2015-2020)



Amnesty International mencatat peningkatan sebanyak 46% penerapan hukuman mati di Indonesia pada tahun 2020, di mana 101 dari 117 vonis hukuman mati yang dijatuhkan untuk pelanggaran hukum terkait narkoba dan 16 terkait pembunuhan. Angka-angka ini mencerminkan tren yang tercatat di tahun-tahun sebelumnya, di mana pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati untuk kejahatan terkait narkoba setidaknya 70% dari seluruh kasus yang diketahui. Lima warga negara asing, semuanya warga negara Malaysia yang dinyatakan bersalah karena perdagangan narkoba, termasuk di antara mereka yang dijatuhi hukuman mati. Empat perempuan, semuanya warga negara Indonesia, dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan (2) dan perdagangan narkoba (2). Di akhir tahun ini, setidaknya 482 orang diyakini berada di bawah vonis hukuman mati.

## VONIS HUKUMAN MATI BARU YANG TERCATAT DI INDONESIA TAHUN 2016-2020



DPR-RI, yang membidangi urusan hukum, membahas penerapan ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk menghukum korupsi dalam penyelenggaraan dana bantuan Covid-19.<sup>27</sup>

Tidak ada pelaksanaan hukum mati yang dilakukan di **Jepang**, untuk pertama kalinya sejak tahun 2011. Tiga pria yang dijatuhi hukuman gantung, dinyatakan bersalah dalam kasus beberapa pembunuhan yang berbeda - total tahunan yang sama dengan lima atau kurang dari lima di kasus tahunan yang tercatat sejak tahun 2012. Pada bulan Januari, seorang pria dibatalkan vonis hukuman matinya saat naik banding dengan alasan bahwa dia memiliki cacat mental (psiko-sosial) yang parah pada saat pembunuhan.<sup>28</sup> Per 31 Desember, 120 orang diyakini berada di bawah vonis hukuman mati, setelah tiga terpidana pria meninggal di dalam penjara saat menunggu eksekusi. Di antara mereka, 110 orang, termasuk enam warga negara asing, vonis hukuman matinya sudah final. Dua orang membatalkan pengajuan banding mereka. Mereka yang sedang menunggu eksekusi ditahan di dalam sel isolasi; dengan tidak adanya pengamanan yang efektif atau evaluasi psikiatris yang teratur, penyandang disabilitas mental (psiko-sosial) dan penyandang disabilitas intelektual masih tetap dikenakan hukuman mati, yang tentu saja melanggar hukum dan standar internasional.<sup>29</sup>

Pada tanggal 20 Februari 2020, pengadilan distrik Osaka menolak permintaan sidang ulang Kenji Matsumoto yang kedelapan. Dia mengalami gangguan delusi saat ditahan di sel isolasi terpidana mati dimana ia sebelumnya memiliki cacat mental (psiko-sosial) jangka panjang yang diakibatkan karena keracunan merkuri (penyakit Minamata) sebelum ia divonis. Menurut pengacaranya, hal ini berperan penting selama interogasi polisi terhadapnya dan telah mengakibatkan “pengakuan” yang dipaksakan. Pengacaranya mengatakan bahwa dia tidak kompeten untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses hukum terkait kasusnya, serta sifat dan tujuan vonis hukuman mati yang dijatuhkan padanya. Dalam menolak permohonannya untuk sidang ulang, pengadilan juga menolak permintaannya agar pengadilan mengeluarkan penundaan pelaksanaan hukum mati sementara proses bandingnya ditunda, yang mana melanggar Pasal 32 dari Konstitusi yang mengatur hak atas peradilan yang adil. Keputusan tersebut melanggar standar internasional tentang hukuman mati.<sup>30</sup>

Pada tanggal 23 Desember, Mahkamah Agung memerintahkan agar kasus Iwao Hakamada dikembalikan ke Pengadilan Tinggi Tokyo untuk disidang ulang. Iwao Hakamada dijatuhi hukuman mati pada tahun 1968 setelah dinyatakan bersalah dalam persidangan yang tidak adil dan mengalami gangguan mental (psiko-sosial) yang parah saat berada dalam sel isolasi terpidana mati. Dia dibebaskan sambil menunggu persidangan ulang pada tahun 2014 dan diizinkan untuk tetap di rumah sementara proses hukum terhadapnya berlanjut.

Amnesty International mencatat sembilan orang, termasuk empat wanita, dijatuhi hukuman mati di **Laos** pada tahun 2020, semuanya karena pelanggaran hukum terkait narkoba.

Pihak berwenang **Malaysia** terus menerapkan moratorium resmi eksekusi mati selama tiga tahun berturut-turut dan mendukung resolusi dua tahunan Majelis Umum PBB yang menyerukan penangguhan penggunaan hukuman mati untuk kedua kalinya. Komite Khusus yang dibentuk pada tahun 2019 oleh almarhum Liew Vui Keong, mantan menteri di Departemen Urusan Hukum Perdana Menteri, untuk mempelajari kebijakan penghukuman dengan tujuan untuk mengganti hukuman mati wajib, menyerahkan laporannya kepada menteri pada tanggal 11 Februari.<sup>31</sup> Menyusul pergantian pemerintahan pada awal bulan Maret, Menteri Takiyuddin Hassan membenarkan dalam tanggapannya kepada parlemen bahwa pemerintah baru telah

---

27 Jakarta Post, —KPK memperingatkan bahwa penipu bantuan COVID-19 menghadapi hukuman mati, 30 April 2020, [thejakartapost.com/news/2020/04/29/kpk-warns-that-covid-19-aid-swindlers-face-death-penalty.html](https://thejakartapost.com/news/2020/04/29/kpk-warns-that-covid-19-aid-swindlers-face-death-penalty.html)

28 Japan Times, —Pengadilan tinggi membatalkan hukuman mati *lay judge* atas pembunuhan lima orang pada tahun 2015, 27 Januari 2020, [japantimes.co.jp/news/2020/01/27/national/crime-legal/japan-court-death-sentence-2015-murders-awaji](https://japantimes.co.jp/news/2020/01/27/national/crime-legal/japan-court-death-sentence-2015-murders-awaji)

29 Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum 36 (2018) mengenai Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, tentang hak untuk hidup, 30 Oktober 2018, UN Doc. CCPR/C/GC/36, paragraf 49.

30 Pengamanan no. 8 tentang Pengamanan PBB yang menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati, yang diadopsi oleh Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1984/50 tanggal 25 Mei 1984, yang dengan jelas menyatakan bahwa —Hukuman mati tidak boleh dilakukan, dengan menunggu banding atau prosedur lain atau proses hukum lain yang berkaitan dengan pengampunan atau peringanan hukuman.

31 Malaysiakini, —Hukuman mati – komite menyerahkan laporan alternatif, 11 Februari 2020, [malaysiakini.com/news/510445](https://malaysiakini.com/news/510445)

menerima versi final laporan tersebut pada tanggal 17 Juli.<sup>32</sup> Meskipun temuan studi tidak dipublikasikan sebelum tahun berakhir, menteri tersebut memberi tahu parlemen pada bulan Agustus bahwa laporan tersebut merekomendasikan penggantian hukuman mati wajib untuk 11 kejahatan di bawah Undang-Undang Obat Berbahaya tahun 1952 dan 21 kejahatan yang diancam dengan hukuman mati namun atas diskresi Pengadilan.<sup>33</sup> Pada bulan Agustus, Pengadilan Federal menyatakan penerapan hukuman mati wajib konstitusional dengan alasan bahwa penetapan peraturan perundang-undangan terkait kejahatan dan hukuman merupakan hak prerogatif parlemen.<sup>34</sup>

Data Departemen Pemasyarakatan menunjukkan bahwa per 30 Juni, terdapat 1.314 orang yang telah divonis mati, termasuk di antaranya 475 orang yang masih mengajukan banding atas vonis mereka di Pengadilan Banding dan Pengadilan Federal, dan 839 orang yang mengajukan banding untuk memohon pengampunan.<sup>35</sup> Artinya, di antara tanggal 1 Desember 2019 - ketika angka resmi telah dikeluarkan sebelumnya - hingga akhir bulan Juni 2020, setidaknya ada 34 vonis mati baru yang dijatuhkan.<sup>36</sup> Selama tahun 2020, Amnesty International mencatat laporan terkait 22 vonis mati baru, termasuk tiga yang terkait peredaran narkoba.

Data resmi juga menunjukkan bahwa untuk periode tahun 2015 hingga 2019, terdapat total 197 orang mengajukan permohonan grasi ke dewan pengampunan negara bagian dan federal, dan 188 warga negara Malaysia dan 198 warga negara asing - termasuk 60 warga negara Nigeria, 39 warga negara Iran, 21 warga negara Indonesia, 13 warga negara Thailand, 11 warga negara India dan 10 warga negara Filipina - mendapati vonis mati mereka dikuatkan oleh Pengadilan Federal.<sup>37</sup> Data ini menggambarkan temuan yang dipublikasikan oleh Amnesty International pada tahun 2019.<sup>38</sup>

Kejaksaan Agung **Maladewa** mengonfirmasi kepada Amnesty International bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan "moratorium informal" eksekusi mati karena Maladewa tengah berfokus pada reformasi sistem peradilan dan menjadikannya lebih independen. Tidak ada vonis mati baru yang dijatuhkan dan 19 orang, termasuk seorang perempuan, tetap berstatus sebagai terpidana mati, di mana semuanya dinyatakan bersalah karena pembunuhan. Tiga orang telah menempuh semua jalur hukum yang tersedia dan lima orang berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan terjadi. Undang-Undang Perlindungan Hak Anak November 2019, yang melarang penerapan hukuman mati bagi orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun, mulai berlaku pada bulan Februari 2020.<sup>39</sup>

Satu vonis mati baru diketahui dijatuhkan di **Myanmar** dalam kasus pembunuhan.<sup>40</sup> Pada tanggal 17 April, sebagai bagian dari perayaan Tahun Baru, Presiden U Win Myint pada saat itu memberikan pengampunan massal dan meringankan semua vonis mati menjadi penjara seumur hidup tanpa tanggal pembebasan.<sup>41</sup> Pihak berwenang tidak mengumumkan berapa banyak terpidana mati yang mendapat keringanan hukuman.

---

32 The Sun Daily, —Kabinet akan membahas laporan penghapusan hukuman mati - Takiyuddin, 13 Agustus 2020, [thesundaily.my/local/cabinet-to-discuss-report-on-abolishing-capital-punishment-takiyuddin-KH3458873](https://thesundaily.my/local/cabinet-to-discuss-report-on-abolishing-capital-punishment-takiyuddin-KH3458873)

33 Parlemen Malaysia, Pertemuan Kedua, Masa jabatan ketiga Parlemen Ke- 14, Tanggapan tertulis atas pertanyaan no. 1 s.d 556, 13 Juli s.d 27 Agustus 2020, Tanggapan atas pertanyaan no. 1.

34 Pengadilan Federal Malaysia, Letitia Bosman v. Jaksa Penuntut Umum dan banding lainnya, [2020] 8 CLJ 147.

35 Parlemen Malaysia, Pertemuan Kedua, Masa Jabatan Ketiga Parlemen Ke- 14, Tanggapan tertulis atas pertanyaan no. 1 s.d 556, 13 Juli s.d 27 Agustus 2020, Tanggapan atas pertanyaan no. 10.

36 Parlemen Malaysia, Pertemuan Ketiga, Masa Jabatan Ketiga Parlemen Ke-14, Tanggapan tertulis atas pertanyaan no. 1 s.d 544, 2 November s.d 17 Desember 2020, Tanggapan atas pertanyaan no. 441.

37 Parlemen Malaysia, Pertemuan Ketiga, Masa Jabatan Ketiga Parlemen Ke-14, Tanggapan tertulis atas pertanyaan no. 1 s.d 544, 2 November s.d 17 Desember 2020, Tanggapan atas pertanyaan no. 441.

38 Amnesty International, Cacat Fatal: Mengapa Malaysia Harus Menghapus Hukuman Mati (Indeks: ACT 50/1078/2019), 10 Oktober 2019, [amnesty.org/en/documents/act50/1078/2019/en](https://amnesty.org/en/documents/act50/1078/2019/en)

39 Pemerintah Maladewa, Laporan nasional yang diserahkan sesuai dengan paragraf 5 lampiran Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 16/21 - Maladewa, 14 Februari 2020, Dokumen PBB A/HRC/WG.6/36/MDV/1, paragraf 146.

40 The Irrawaddy, —Pengadilan Myanmar memvonis mati pria dengan digantung karena pembunuhan cinta segitiga, 15 Januari 2020, [irrawaddy.com/news/burma/myanmar-court-sentences-man-death-hanging-love-triangle-murder.html](https://irrawaddy.com/news/burma/myanmar-court-sentences-man-death-hanging-love-triangle-murder.html)

41 Myanmar Times, —Hampir 25.000 tahanan dibebaskan pada Tahun Baru Myanmar, 17 April 2020, [mmtimes.com/news/nearly-25000-prisoners-freed-myanmar-new-year.html](https://mmtimes.com/news/nearly-25000-prisoners-freed-myanmar-new-year.html)

Tanpa adanya akses ke **Korea Utara** serta media dan sumber independen di negara tersebut, Amnesty International menghadapi tantangan yang signifikan dalam upaya verifikasi informasi terkait penerapan hukuman mati pada tahun 2020. Meski terdapat kemungkinan besar bahwa eksekusi mati terus dilakukan dan vonis mati terus dijatuhkan dengan tingkat yang berkelanjutan, Amnesty International tidak dapat mengelaborasi laporan pelaksanaan eksekusi mati, termasuk eksekusi mati yang dilakukan di depan umum; atau oleh Komite Sentral dan pejabat Partai Buruh Korea lainnya.<sup>42</sup> Organisasi ini juga tidak dapat melakukan verifikasi atas informasi yang berkaitan dengan vonis mati yang dijatuhkan, yang dilaporkan terjadi setelah persidangan yang singkat dan untuk berbagai tindakan yang tidak memenuhi ambang batas "kejahatan paling serius", di mana penggunaan hukuman mati harus dibatasi berdasarkan hukum internasional, atau yang tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana yang diakui sesuai dengan persyaratan hukum hak asasi manusia internasional.<sup>43</sup>

Tidak ada eksekusi mati yang dilaporkan di **Pakistan** untuk pertama kalinya sejak pelaksanaan eksekusi dimulai kembali pada bulan Desember 2014. Amnesty International mencatat jumlah vonis mati yang jauh lebih rendah pada tahun 2020 (49) dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang sebagian dapat dikaitkan dengan jeda dalam proses pengadilan karena pandemi Covid-19. Dua vonis mati yang tercatat dijatuhkan karena "penistaan agama"; 19 dijatuhkan oleh Pengadilan Anti-terorisme; dan tujuh oleh Model Criminal Trial Courts, yaitu pengadilan khusus yang didirikan pada tahun 2019 untuk menangani tumpukan perkara pidana. Pada tanggal 17 Juni, Pengadilan Tinggi Peshawar membatalkan vonis bersalah 196 orang yang diadili oleh pengadilan militer dan, dalam banyak kasus, divonis mati.<sup>44</sup> Pengadilan militer didirikan pada bulan Januari 2015, setelah terjadinya serangan di sebuah sekolah di Peshawar pada Desember 2014, untuk mengadili warga sipil yang dicurigai melakukan kejahatan terkait terorisme. Proses persidangan di bawah pengadilan militer ini tidak memenuhi standar peradilan yang adil secara internasional. Dalam sebuah putusan penting pada bulan Juni, Pengadilan Tinggi meringankan vonis mati yang dijatuhkan kepada Muhammad Iqbal, yang berusia 17 tahun saat ditangkap pada tahun 1998.<sup>45</sup> Surat perintah eksekusi mati dalam kasusnya telah dikeluarkan pada tahun 2016.

Pada tanggal 1 Oktober, 37 anggota Dewan Perwakilan Rakyat **Filipina** memperkenalkan rancangan undang-undang baru yang merevisi Undang-Undang Obat Berbahaya Komprehensif tahun 2002 untuk menaikkan hukuman bagi kejahatan terkait narkoba, termasuk dengan menerapkan kembali hukuman mati. Beberapa langkah lain untuk mengembalikan hukuman mati yang diajukan pada tahun-tahun sebelumnya masih menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (13) dan Senat (10) pada akhir tahun. Filipina adalah negara pihak dari Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang bertujuan menghapus hukuman mati.

Pihak berwenang di **Singapura** tidak melaksanakan eksekusi mati untuk pertama kalinya sejak tahun 2013.<sup>46</sup> Jeda ini terutama terkait dengan proses pengadilan yang sedang berlangsung, termasuk dampak pembatasan terkait pandemi Covid-19 terhadap aspek-aspek utama dari proses hukuman mati. Saat Singapura menghadapi lonjakan pertama kasus Covid-19, pada tanggal 5 Februari Presiden Halimah Yacob mengeluarkan penundaan sementara eksekusi mati dan menghentikan hukuman gantung pertama yang tercatat pada tahun tersebut dua hari

---

42 Lihat misalnya Korea Times, —Korea Utara secara terbuka melaksanakan hukuman mati pada 2 orang karena pelanggaran karantina, 7 Desember 2020, [koreatimes.co.kr/www/nation/2020/12/103\\_300477.html](http://koreatimes.co.kr/www/nation/2020/12/103_300477.html); dan Dong-a Ilbo, —Pejabat Korea Utara dalam isolasi untuk mencegah korona, diam-diam pergi ke pemandian umum dan kemudian melakukan penembakan, 13 Februari 2020, [donga.com/news/article/all/20200213/99665772/1](http://donga.com/news/article/all/20200213/99665772/1)

43 Yonhap News, —Badan Intelijen Nasional, 'Kim Jong-un, melaksanakan hukuman mati pada *money changer* karena menjatuhkan nilai tukar mata uang, 27 November 2020, [yna.co.kr/view/AKR20201127072351001](http://yna.co.kr/view/AKR20201127072351001); Radio Free Asia, —Enam orang ditembak di depan umum atas tuduhan perdagangan seks terorganisir di Pyongyang Utara, 6 Agustus 2020, [rfa.org/korean/in\\_focus/ne-kw-08062020070746.html](http://rfa.org/korean/in_focus/ne-kw-08062020070746.html)

44 Dawn, "PHC membatalkan 200 vonis oleh pengadilan militer", 17 Juni 2020, [dawn.com/news/1564018](http://dawn.com/news/1564018)

45 Dawn, —Vonis mati dalam kasus remaja yang diringankan hukumannya 9 Juni 2020, [dawn.com/news/1562319](http://dawn.com/news/1562319)

46 Dinas Penjara Singapura, Statistik Tahunan Dinas Penjara Singapura 2020, 4 Februari 2021, [sps.gov.sg/news-about-us/in-the-news/singapore-prison-service-annual-statistics-release-for-2020-1](http://sps.gov.sg/news-about-us/in-the-news/singapore-prison-service-annual-statistics-release-for-2020-1)

sebelum jadwal pelaksanaannya.<sup>47</sup> Pada tanggal 8 September, Presiden mengeluarkan perintah eksekusi mati baru, dalam kasus yang sama, untuk dilaksanakan 10 hari kemudian. Pendamping hukum dari pria yang terancam eksekusi mati, yaitu warga negara Singapura bernama Syed Suhail bin Syed Zin, mencari dan mendapatkan penundaan eksekusi mati dari pengadilan atas beberapa alasan, termasuk bahwa kliennya telah mengalami diskriminasi dalam pemilihan dan penyusunan prioritas kasus yang akan dieksekusi mati karena kewarganegaraannya. Dia mengklaim bahwa warga negara asing, termasuk beberapa yang kasusnya terjadi lebih dulu, tampak menghadapi risiko yang lebih rendah karena pembatasan perjalanan dan pembatasan lainnya terkait Covid-19, yang membuat hambatan terkait kunjungan keluarga terakhir dan pemulangan jenazah.<sup>48</sup> Meskipun negara tersebut mengakui bahwa mereka tidak memiliki kendali atas pembatasan perjalanan yang ditetapkan di negara lain, negara itu menolak klaim tersebut dan menyatakan bahwa litigasi terpisah yang melibatkan beberapa pria Malaysia adalah alasan di balik penundaan tersebut. Pengadilan Tinggi memberikan izin untuk banding dan memperpanjang penundaan eksekusi mati hingga lebih dari akhir tahun. Selain Syed Suhail bin Syed Zin, eksekusi mati Moad Fadzir bin Mustaffa yang telah dijadwalkan dihentikan sehari sebelum eksekusi dilaksanakan pada bulan September.<sup>49</sup> Kedua pria tersebut dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman mati wajib atas kejahatan terkait narkoba.

Delapan laki-laki lainnya, termasuk tiga warga negara asing, divonis hukuman mati wajib selama tahun 2020, enam karena pelanggaran terkait narkoba dan dua karena pembunuhan. Sejak pertengahan April, proses pengadilan mulai berlangsung secara jarak jauh karena pandemi COVID-19 — terdakwa divonis hukuman mati melalui koneksi secara jarak jauh dari penjara, terpisah dari pengacaranya.<sup>50</sup> Akses pengacara yang terbatas ke para terdakwa menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan hak atas persidangan yang adil, khususnya dalam sidang tuntutan hukuman mati, apalagi dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan di hadapan Mahkamah Agung tentang kemungkinan pelanggaran oleh otoritas penjara atas komunikasi istimewa antara pengacara dan klien tanpa perintah pengadilan atau pengawasan pada prosesnya.<sup>51</sup>

Lima laki-laki yang sebelumnya divonis hukuman mati dibebaskan dari tuntutan hukuman mati, termasuk dua orang yang telah gagal dalam proses banding biasa. Di antara mereka adalah seorang warga negara Nigeria, yang menghadapi hukuman mati karena dituduh terlibat pengedaran narkoba.<sup>52</sup> Dia awalnya dinyatakan tidak bersalah pada bulan November 2014, namun setelah jaksa penuntut naik banding, Pengadilan Banding menemukan bahwa hakim sidang tidak mempertimbangkan dengan tepat dampak dari beberapa klaim yang dibuat laki-laki itu dalam sebuah pernyataan setelah ia ditangkap. Dia dinyatakan bersalah dan kasusnya diserahkan ke Pengadilan Tinggi untuk dijatuhi hukuman. Atas permintaan jaksa penuntut, seorang ahli medis memeriksa tahanan tersebut dan mendiagnosanya menderita gangguan stres pascatrauma atau Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) dengan gejala disosiatif, akibat trauma masa kanak-kanak. Ahli tersebut berpendapat bahwa gejala PTSD dipicu ketika dia diberitahu bahwa dia menghadapi hukuman mati dan kemungkinan besar menyebabkan dia membuat klaim-klaim itu selama interogasi. Ini memungkinkan kasusnya dibuka kembali pada tahun 2017 dan akhirnya dia dibebaskan pada bulan September 2020.

Pada bulan Juni, Pengadilan Tinggi Busan di **Korea Selatan** meringankan vonis hukuman mati yang dijatuhkan pada seorang laki-laki pada bulan November 2019, dengan alasan dia memiliki disabilitas mental (psiko-sosial) yang parah; Mahkamah Agung menegaskan kembali keputusan

---

47 Pengadilan Banding Singapura, Syed Suhail bin Syed Zin v. Jaksa Agung, [2020] SGCA 122.

48 Syed Suhail bin Syed Zin v. Jaksa Agung.

49 Amnesty International, —Singapura: Masalah pengadilan yang adil harus mengarah pada peninjauan segera atas semua kasus hukuman mati (Indeks: ACT 50/3092/2020), 21 September 2020, [amnesty.org/en/documents/act50/3092/2020/en/](https://www.amnesty.org/en/documents/act50/3092/2020/en/)

50 NBC News, —Pengadilan Singapura memvonis mati tersangka narkoba dalam aplikasi konferensi video Zoom, 20 Mei 2020, [nbcnews.com/news/world/singapore-court-sentences-drug-suspect-death-zoom-videoconferencing-app-n1211126](https://www.nbcnews.com/news/world/singapore-court-sentences-drug-suspect-death-zoom-videoconferencing-app-n1211126)

51 Pengadilan Banding Singapura, Syed Suhail bin Syed Zin v. Jaksa Penuntut Umum, [2020] SGCA 101, paragraf 12; dan Datchinamurthy a/l Kataiah dan Gobi a/l Avedian v. Jaksa Agung, [2020] SGCA 77.

52 Pengadilan Banding Singapura, Ilechukwu Uchechukwu Chukwudi v. Jaksa Penuntut Umum, [2020] SGCA 90.

tersebut pada bulan Oktober.<sup>53</sup> Angka resmi yang diberikan kepada Amnesty Internasional menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2020, 60 laki-laki, termasuk dua warga sipil negara asing dan empat anggota militer, berada di deret tunggu eksekusi mati dengan vonis hukuman mati yang sudah final.

Mahkamah Agung **Sri Lanka** memperpanjang perintah penundaan pelaksanaan hukuman mati yang sebelumnya disahkan oleh Presiden Maithripala Sirisena pada bulan Juni 2019.<sup>54</sup> Perintah tersebut diberlakukan untuk memungkinkan pertimbangan petisi yang menyatakan bahwa pemilihan secara sewenang-wenang terhadap empat narapidana dan kerahasiaan seputar perintah pelaksanaan hukum mati dan persiapannya melanggar hak-hak para terpidana. Setidaknya 16 laki-laki, termasuk satu warga negara asing, dijatuhi hukuman mati selama satu tahun ini. Tiga orang di antaranya dinyatakan bersalah karena pelanggaran terkait narkoba.

Pada tanggal 1 April, pihak berwenang di **Taiwan** menembak seorang pria yang dinyatakan bersalah karena pembakaran yang mengakibatkan kematian, dalam pelaksanaan eksekusi pertamanya sejak tahun 2018.<sup>55</sup> Lima vonis hukuman mati baru dijatuhkan, termasuk satu perempuan, dan satu laki-laki yang telah hukuman matinya sudah berkekuatan hukum tetap. Pada bulan Mei, Pengadilan Tinggi Tainan membebaskan Hsieh Chih-hung, yang telah dikeluarkan dari penjara sambil menunggu persidangan ulang pada tahun 2019 setelah menghabiskan 18 tahun di bawah vonis hukuman mati.<sup>56</sup> Pihak berwenang menunjukkan kepada Amnesty International bahwa 38 orang termasuk seorang perempuan, berada di deret tunggu eksekusi mati pada akhir tahun 2020 dengan vonis hukuman yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pada tanggal 15 Juli, Kementerian Kehakiman mengamendemen Aturan untuk Eksekusi Hukuman Mati dengan memberikan terpidana mati hak untuk mengatur upacara keagamaan yang mereka pilih sebelum pelaksanaan hukuman mati dan konseling psikologis untuk algojo, perubahan yang secara implisit mengakui dampak hukuman mati kepada semua yang terlibat. Namun, peraturan yang diamendemen gagal mensyaratkan pemberitahuan tentang pelaksanaan hukum mati yang dijadwalkan kepada keluarga narapidana dan tidak melarang penggunaan hukuman mati untuk orang yang memiliki cacat mental atau intelektual parah, di antara masalah lainnya.

Angka resmi yang diberikan kepada Amnesty Internasional menunjukkan bahwa 35 vonis hukuman mati baru dijatuhkan di **Thailand**; 15 warga negara asing termasuk di antara 235 orang yang menghadapi hukuman mati pada akhir tahun ini. Raja Maha Vajiralongkorn Badinthepp Thearawangkun mengeluarkan pengampunan kerajaan pada dua kesempatan pada bulan Agustus dan Desember, yang menghasilkan peringanan 107 vonis hukuman mati.<sup>57</sup> Dua puluh dua orang dibebaskan dari tuduhan. Setidaknya tujuh laki-laki dan satu perempuan divonis hukuman mati karena pelanggaran terkait narkoba; angka-angka yang diterbitkan oleh Department of Corrections pada tanggal 1 Desember menunjukkan bahwa 131 orang, termasuk 26 perempuan, dari 240 (55%) berada di deret tunggu eksekusi mati untuk jenis kejahatan ini.

Data tentang penggunaan hukuman mati di **Vietnam** tetap dirahasiakan sebagai rahasia negara. Pada tanggal 16 Oktober, media nasional melaporkan bahwa pemerintah telah menyerahkan, dengan persetujuan Perdana Menteri, sebuah laporan kepada Majelis Nasional yang mencatat bahwa per tanggal 30 September jumlah terpidana mati meningkat sebanyak 440, atau 34%, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Angka ini saja tidak memungkinkan perhitungan yang akurat dari jumlah vonis hukuman mati yang dijatuhkan selama tahun 2020,

---

53 KBS World, "Mahkamah Agung menegakkan vonis seumur hidup untuk kasus pembakaran-pembunuhan", 29 Oktober 2020, [world.kbs.co.kr/service/news\\_view.htm?lang=e&Seq\\_Code=157233](http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=157233)

54 Colombo Gazette, —FR melawan hukuman mati yang terdaftar untuk mencari dukungan pada 14 Oktober, 29 Mei 2020, [colombogazette.com/2020/05/29/frs-against-death-penalty-listed-for-support-on-14-october](http://colombogazette.com/2020/05/29/frs-against-death-penalty-listed-for-support-on-14-october)

55 Amnesty International Taiwan, —Taiwan: Pelaksanaan hukum mati kedua di bawah Presiden Tsai Ing-wen, kemunduran yang memalukan bagi hak asasi manusia, 2 April 2020, [amnesty.tw/news/3381](http://amnesty.tw/news/3381)

56 Taipei Times, —Setelah 19 tahun berada di sel penjara terpidana mati, Hsieh Chih-hung dibebaskan, 16 Mei 2020, [taipeitimes.com/News/front/archives/2020/05/16/2003736489](http://taipeitimes.com/News/front/archives/2020/05/16/2003736489)

57 Keputusan Pengampunan Kerajaan B.E. 2020 tanggal 13 Agustus 2020; dan Keputusan Kerajaan yang dikeluarkan pada saat kelahiran kerajaan Yang Mulia Raja Maha Bhumibol Adulyadej, Borommanat Bophit yang Agung pada Hari Nasional dan Hari Ayah Nasional, 2020, 4 Desember 2020.

karena kemungkinan adanya penurunan jumlah vonis karena peringanan dan karena periode pelaporan tidak didefinisikan secara jelas sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun, angka ini menunjukkan bahwa ratusan orang terus divonis hukuman mati setiap tahun, dan sekitar 1.734 orang berada di bawah vonis hukuman mati hingga akhir bulan September 2020. Laporan media tersebut juga menyoroti keprihatinan pemerintah terhadap kepadatan yang berlebihan dan kondisi penahanan lainnya dari mereka yang menghadapi hukuman mati, dan mencatat bahwa 57 dari 69 fasilitas penahanan telah membangun area penahanan terpisah untuk menampung terpidana yang berada di deret tunggu eksekusi mati, dengan total 700 sel dengan kapasitas lebih dari 1.200 narapidana— sebuah angka yang sesuai dengan perkiraan total 1.734.

Amnesty Internasional terus memantau laporan tentang penggunaan hukuman mati sepanjang tahun ini, namun hanya dapat mengumpulkan informasi tentang 54 vonis hukuman mati baru. Tujuh di antaranya dijatuhkan pada perempuan; 10 kepada warga negara asing. Empat puluh tujuh orang divonis mati karena pelanggaran terkait narkoba dan dua karena penggelapan – pelanggaran yang tidak memenuhi ambang batas kejahatan paling serius di bawah hukum dan standar internasional.

Pemerintah mengeluarkan keputusan No. 43/2020, yang berlaku mulai tanggal 15 April, dan Surat Edaran Bersama No. 02/2020, yang berlaku sejak tanggal 1 Desember, untuk mengatur proses, jadwal dan peran serta tanggung jawab pihak berwenang dalam pelaksanaan hukum mati dengan suntikan mati. Di antara unsur-unsur lain, aturan-aturan tersebut mengizinkan anggota keluarga dari narapidana yang dihukum mati, termasuk jika mereka adalah warga negara asing, untuk mengajukan permintaan pengembalian jenazah atau abunya.

Pada tanggal 8 Mei, Mahkamah Agung Rakyat menegaskan mengenai vonis bersalah dan pidana hukuman mati yang dijatuhkan pada HỒ Duy Hải pada tingkat kasasi terakhir.<sup>58</sup> Pada tanggal 15 Juni, dua anggota Majelis Nasional mengajukan petisi untuk meninjau kasusnya, yang ditugaskan ke Komite Kehakiman. Media Vietnam melaporkan pada bulan November bahwa Komite Kehakiman telah menyerahkan laporannya tentang kasus tersebut pada tanggal 14 Agustus, namun isi laporan tersebut tidak dipublikasikan. HỒ Duy Hải menyatakan bahwa dia dipaksa untuk mengakui pembunuhan melalui penyiksaan selama interogasi polisi dan kemudian mencabut pengakuan tersebut. Kasusnya telah dinodai penyimpangan prosedural lainnya dan pengabaian bukti kunci yang dapat membebaskannya dari tuduhan. Dia hampir dihukum mati dua kali dalam dekade terakhir.<sup>59</sup>

---

58 Radio Free Asia, —Mahkamah Agung Vietnam menegaskan kembali vonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan Ho Duy Hai yang telah berusia satu dekade, 15 Juni 2020, [rfa.org/english/news/vietnam/ho-06152020195024.html](https://rfa.org/english/news/vietnam/ho-06152020195024.html)

59 Lihat Amnesty International, Vonis Hukuman Mati dan Pelaksanaan Hukum Mati pada tanggal 2019 (Indeks: ACT 50/9870/2019), 21 April 2020, [amnesty.org/en/documents/act50/1847/2020/en/](https://www.amnesty.org/en/documents/act50/1847/2020/en/)

# ANNEX I: EKSEKUSI DAN HUKUMAN MATI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2020

Laporan ini hanya mencakup penggunaan hukuman mati secara judicial dan tidak mencantumkan angka untuk eksekusi di luar hukum. Amnesty Internasional hanya melaporkan angka yang bisa dikonfirmasi secara masuk akal, meskipun angka sebenarnya untuk beberapa negara lebih tinggi secara signifikan. Beberapa negara secara sengaja menutupi proses penjatuhan hukuman mati; beberapa negara tidak menyimpan atau menyediakan data untuk hukuman dan eksekusi hukuman mati.

Di mana tanda “+” muncul setelah angka di sebelah nama negara – contohnya, Malaysia (22+) – itu berarti Amnesty International mengkonfirmasi 22 eksekusi atau hukuman mati di Malaysia, tetapi meyakini ada lebih dari 22. Di mana tanda “+” muncul setelah nama negara tanpa angka – contohnya, Suriah (+) – itu berarti Amnesty International membenarkan terjadinya eksekusi atau hukuman mati (lebih dari satu) di negara tersebut tetapi tidak memiliki informasi yang cukup untuk menunjukkan angka minimal yang kredibel. Ketika menghitung jumlah total global dan regional, tanda “+” dihitung 2, termasuk untuk Cina.

## EKSEKUSI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2020

Cina 1,000s	Somalia 11+	Bangladesh 2
Iran 246+	Yemen 5+	Taiwan 1
Mesir 107+	India 4	Qatar 1
Irak 45+	Oman 4	Korea Utara +
Arab Saudi 27	Botswana 3	Suriah +
Amerika Serikat 17	Sudan Selatan 2+	Viet Nam +

# HUKUMAN MATI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2020

Cina 1,000s	Palestina (Negara) 17+	Yordania 2+
Yemen 269+	Sri Lanka 16+	Kuwait 2+
Mesir 264+	Sudan 10+	Malawi 2+
Zambia 119	Laos 9+	Trinidad dan Tobago 2
Indonesia 117+	Arab Saudi 8+	Algeria 1+
Bangladesh 113+	Tunisia 8+	Kamerun 1+
India 77	Singapur 8	Lebanon 1+
Nigeria 58+	Sudan Selatan 6+	Mauritania 1+
Viet Nam 54+	Zimbabwe 6	Maroko/Sahara Barat 1+
Pakistan 49+	Taiwan 5	Botswana 1
Sierra Leone 39	Afghanistan 4+	Comoros 1
Thailand 35	Qatar 4+	Gambia 1
Mali 30	Uni Emirat Arab 4+	Myanmar 1
Irak 27+	Bahrain 3	Iran +
Malaysia 22+	Belarus 3	Kenya +
Republik Demokratik Kongo 20+	Ghana 3	Korea Utara +
Amerika Serikat 18	Jepang 3	Somalia +
Libya 17+	Nigeria 3	Suriah +

# ANNEX II: NEGARA ABOLISIONIS DAN RETENSIONIS SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020

Lebih dari dua per tiga negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati dalam hukumnya atau dalam praktiknya. Sampai dengan 31 Desember 2020 angkanya adalah sebagai berikut:

Abolisionis untuk segala jenis kejahatan:	108
Abolisionis untuk kejahatan biasa:	8
Abolisionis dalam praktiknya:	28
Abolisionis secara total dalam hukumnya atau praktiknya:	144
Retensionis:	55

Berikut adalah daftar negara dalam empat kategori: abolisionis untuk segala jenis kejahatan, abolisionis untuk kejahatan biasa, abolisionis dalam praktiknya, dan retensionis.

## 1. ABOLISIONIS UNTUK SEGALA JENIS KEJAHATAN

Negara yang hukumnya tidak mencantumkan hukuman mati untuk kejahatan apa pun:

Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Kamboja, Kanada, Chad, Kolombia, Kongo (Republik), Kepulauan Cook, Kosta Rika, Pantai Gading, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Djibouti, Republik Dominika, Ekuador, Estonia, Fiji, Finlandia, Perancis, Gabon, Georgia, Jerman, Yunani, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Hungaria,

Islandia, Ireland, Italia, Kiribati, Kosovo\*,<sup>60</sup> Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritius, Meksiko, Mikronesia, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Namibia, Nauru, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Niue, Makedonia Utara, Norwegia, Palau, Panama, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Romania, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tome dan Principe, Senegal, Serbia, Seychelles, Slovakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Afrika Selatan, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Turki, Turkmenistan, Tuvalu, Inggris, Ukraina, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Kota Vatikan, Venezuela.

## 2. ABOLISIONIS UNTUK KEJAHATAN BIASA

Negara yang hukumnya mencantumkan hukuman mati hanya untuk kejahatan luar biasa, seperti kejahatan di bawah hukum militer atau kejahatan yang dilakukan dalam keadaan luar biasa:<sup>61</sup>

Brasil, Burkina Faso, Chili, El Salvador, Guatemala, Israel, Kazakhstan, Peru.

## 3. ABOLISIONIS DALAM PRAKTIKNYA

Negara yang mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan biasa, seperti pembunuhan, tetapi bisa dianggap abolisionis karena tidak mengeksekusi siapa pun selama 10 tahun terakhir dan dipercaya memiliki kebijakan atau menetapkan praktik untuk tidak mengeksekusi:

Aljazair, Brunei Darussalam, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Eritrea, Eswatini (bekas Swaziland), Ghana, Grenada, Kenya, Laos, Liberia, Malawi, Maldives, Mali, Mauritania, Maroko/Sahara Barat, Myanmar, Niger, Papua Nugini, Federasi Rusia,<sup>62</sup> Sierra Leone, Korea Selatan (Republik Korea), Sri Lanka, Tajikistan, Tanzania, Tonga, Tunisia, Zambia.

## 4. RETENSIONIS

Negara yang mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan biasa:

Afghanistan, Antigua dan Barbuda, Bahama, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Botswana, Cina, Komoro, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Dominika, Mesir, Guinea Ekuatorial, Etiopia, Gambia, Guyana, India, Indonesia, Iran, Iraq, Jamaika, Jepang, Yordania, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Libya, Malaysia, Nigeria, Korea Utara (Republik Demokratik Rakyat Korea), Oman, Pakistan, Palestina (Negara Bagian), Qatar, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Arab Saudi, Singapura, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Taiwan, Thailand, Trinidad dan Tobago, Uganda, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Viet Nam, Yaman, Zimbabwe.

---

60 Penunjukan ini (\*) tanpa prasangka terhadap posisi dari status, dan sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244 dan Opini Mahkamah Internasional tentang deklarasi kemerdekaan Kosovo.

61 Tidak ada eksekusi yang tercatat di negara-negara ini selama lebih dari 10 tahun.

62 Federasi Rusia memberlakukan moratorium terhadap eksekusi di bulan Agustus 1996. Tetapi, eksekusi tetap dijalankan antara tahun 1996 dan 1992 di Republik Chechnya.

INDEX: ACT 50/3760/2021  
APRIL 2021

**amnesty.org**

